

**DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN PIK 2
STUDI KASUS PANTAI INDAH KAPUK 2 - JAKARTA UTARA****Sardianto¹, Sigit Prataama², Muhammad Abid Djazuli³****karyasardi@gmail.com¹, sigitprataama@gmail.com², muhmadabid16@gmail.com³****Universitas Mpu Tantular****ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari Program perbaikan lahan Pantai indah kapuk 2 terhadap masyarakat kecamatan Teluk naga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program perbaikan lahan Pantai indah kapuk 2 memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat kecamatan Teluk naga, termasuk perubahan mata pencaharian, peningkatan pendapatan, dan perubahan pola hidup. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa dampak negatif seperti penggusuran lahan, kehilangan mata pencaharian, dan kerusakan lingkungan juga dialami oleh sebagian masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dan pengembang memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dan melakukan mitigasi dampak negatif melalui program-program yang tepat.

Kata Kunci: Reklamasi Pantai, Dampak Sosial, Ekonomi Dan Masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to analyze the social and economic impacts of the Pantai Indah Kapuk 2 reclamation policy on the community of Teluknaga District. The research employs a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observations, and document studies. The findings indicate that the Pantai Indah Kapuk 2 reclamation policy has had significant social and economic impacts on the Teluknaga community, including changes in livelihoods, increased income, and shifts in lifestyle. However, the study also reveals that negative impacts, such as land displacement, loss of livelihoods, and environmental degradation, have been experienced by some members of the community. Therefore, this study recommends that the government and developers pay close attention to the interests of local residents and implement appropriate programs to mitigate these negative impacts.

Keywords: Coastal Reclamation, Social Impact, Economy, And Community.

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat wilayah pesisir urban, seperti yang terjadi di Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta, seringkali memicu transformasi lanskap sosial dan ekonomi yang signifikan. Proyek reklamasi dan pengembangan masif di kawasan PIK, termasuk ekspansi ke PIK 2, telah menciptakan pusat bisnis dan hunian mewah yang menarik investasi, namun di sisi lain menimbulkan isu-isu krusial terkait keberlanjutan sosial. Pembangunan ini berpotensi menyebabkan ketimpangan spasial, konflik pemanfaatan ruang, serta pergeseran mata pencaharian tradisional masyarakat lokal, terutama nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dampak sosial-ekonomi yang terjadi akibat pembangunan kawasan PIK terhadap komunitas yang berada di sekitarnya. Proyek reklamasi di pesisir utara Jakarta, termasuk pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) dan pengembangannya, merupakan intervensi antropogenik berskala besar yang secara fundamental mengubah ekosistem pesisir. Alih fungsi lahan rawa dan hutan bakau menjadi kawasan urban modern menimbulkan berbagai dampak ekologis, seperti perubahan hidrologi, peningkatan risiko banjir di area sekitarnya, serta degradasi habitat bagi biota laut. Meskipun pengembang seringkali menyoroti manfaat ekonomi dan

pariwisata, studi ilmiah yang komprehensif mengenai dampak lingkungan jangka panjang sangat dibutuhkan untuk mengevaluasi keberlanjutan proyek ini. Penelitian ini berfokus pada analisis dampak ekologis yang ditimbulkan oleh reklamasi PIK terhadap kualitas air, biodiversitas, dan keseimbangan ekosistem pesisir. Pengelolaan tata ruang di wilayah pesisir yang strategis, seperti Teluk Jakarta, selalu diwarnai oleh tarik-menarik kepentingan antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) merupakan manifestasi dari kebijakan tata ruang yang kontroversial, di mana proyek-proyek skala besar seringkali menimbulkan konflik antar-pihak yang berkepentingan. Kebijakan reklamasi yang memprioritaskan pembangunan kawasan elit seringkali bertentangan dengan kebutuhan masyarakat lokal dan pertimbangan ekologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis dinamika kebijakan tata ruang dan resolusi konflik yang muncul dari pembangunan PIK, dengan fokus pada bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi akses dan keberlanjutan sumber daya bagi masyarakat pesisir.

Dan pada dasarnya proyek ini juga mendapat persetujuan dari pemerintah pusat yang memberikan izin dan di keluarkannya Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, yang menjadi dasar pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa PSN mencakup Pembangunan berbagai fasilitas seperti jalan nasional, bandara, Kawasan industri, Kawasan wisata, dan pabrik pengolahan mineral (smelter). Kemudian, sesuai peraturan Menteri koordinator Bidang perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 yang mengubah peraturan Nomor 7 tahun 2021, jumlah proyek PSN bertambah menjadi 204 proyek dan 13 program.

Pada Maret 2024, presiden Joko Widodo Kembali menetapkan 14 proyek Pembangunan baru Sebagai bagian dari PSN. Menurut Binekasari (2024), proyek-proyek baru ini dilakukan di beberapa provinsi di Indonesia, mulai dari Jakarta, Banten, Jawa barat, Jawa timur, Kepulauan riau, Sulawesi Tengah, Kalimantan timur, hingga Sulawesi Tenggara. Penetapan 14 PSN baru mencakup pengembangan di berbagai sektor, yang terdiri dari 2 kawasan pariwisata, 8 kawasan industri, 2 jalan tol, 1 kawasan riset mengenai teknologi pendidikan dan kesehatan serta 1 proyek migas lepas pantai. Salah satu dari 14 mega proyek tersebut terdapat proyek pembangunan PIK 2. Proyek tersebut berfokus pada pengembangan kawasan hijau dan kota ramah lingkungan di lahan seluas 1.756 hektare dengan nilai investasi sebesar 65 triliun rupiah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode systematic Literature Review (SLR). Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis dampak Pembangunan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Metode SLR memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan meninjau berbagai hasil penelitian, pendapat, serta temuan dari sumber-sumber yang relevan dengan topik ini. Menurut Synder (2019), SLR berperan penting sebagai cara sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyatukan berbagai studi yang sudah diterbitkan, sehingga peneliti dapat memahami suatu fenomena secara menyeluruh.

Selain itu, metode SLR juga membantu meningkatkan transparasi dan akurasi dalam penelitian ilmiah, karena proses seleksi dan pengumpulan datanya dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik (Kitchenham 2004). Menurut Fink (2010), metode ini juga membantu mengurangi bias dalam memilih dan menafsirkan sumber literatur, karena semua Langkah dilakukan secara jelas dan terbuka. Dengan kata lain, SLR tidak hanya meninjau hasil penelitian sebelumnya, tetapi juga menilai kualitas dan kontribusinya secara kritis.

Dalam penelitian ini, SLR digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam berbagai dampak Pembangunan Pantai Indah Kapuk 2, seperti yang dibahas dalam berbagai tulisan ilmiah dan kebijakan pemerintah. Pencarian sumber dilakukan melalui beberapa basis data nasional dan internasional seperti Scopus, ScienceDirect, Google Scholar, dan Garuda, dengan menggunakan kata kunci yang relevan. Proses seleksi dilakukan dengan kriteria yang ketat serta mengikuti tahapan penyaringan yang sistematis. Seluruh Langkah penelitian ini mengikuti panduan PRISMA (Preferred Reporting Items For Systematic Reviews and Meta Analyses), yang umum digunakan untuk menjaga agar proses peninjauan literatur berjalan dengan terstruktur dan transparan.

HASIL DAN PEMBAHSAN

Dampak Lingkungan

Pantai Indah Kapuk (PIK) adalah salah satu kawasan pesisir di Jakarta Utara yang telah menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir. Kawasan ini terkenal dengan perkembangan pesat properti elite dan proyek infrastruktur berskala besar. Di balik kemewahan kawasan ini, terdapat tantangan besar yang menyangkut dampak lingkungan dari pembangunan intensif yang terjadi, terutama terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti reklamasi pantai, pembangunan pusat perbelanjaan modern, kawasan residensial mewah, serta sarana hiburan. Pertanyaan utama yang muncul adalah: Apakah proyek strategis di kawasan PIK sangat merusak dan membahayakan lingkungan di sekitarnya?

Salah satu proyek yang paling menonjol di kawasan ini adalah Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional oleh pemerintah Indonesia. Proyek ini mencakup wilayah yang sangat luas, sekitar 1.500 hektar, dan dirancang untuk menjadi pusat pengembangan modern yang meliputi fasilitas residensial, komersial, dan hiburan. Status sebagai PSN memberikan sejumlah keuntungan bagi proyek ini, termasuk percepatan proses perizinan dan prioritas dalam alokasi sumber daya. Namun, status ini juga memicu perdebatan terkait dampaknya terhadap lingkungan, terutama karena sebagian wilayah PIK 2 sebelumnya diklasifikasikan sebagai hutan lindung.

Reklamasi dan pembangunan di kawasan ini berpotensi merusak ekosistem pesisir yang sensitif, termasuk hutan bakau yang berfungsi sebagai habitat bagi berbagai spesies, pelindung alami terhadap erosi, dan penyerap karbon. Dengan konversi wilayah tersebut menjadi kawasan urban, ada risiko besar kehilangan fungsi ekologis yang vital. Selain itu, reklamasi pantai sering kali melibatkan penggalian dan pemindahan material dari wilayah lain, yang pada akhirnya juga menimbulkan dampak lingkungan tambahan di luar kawasan proyek.

Salah satu kelemahan utama dalam pelaksanaan proyek ini adalah kurangnya standar operasional yang jelas mengenai dampak sosial dan lingkungan.

Ketidakjelasan pedoman operasional ini memperburuk risiko terjadinya kerusakan lingkungan yang masif. Tanpa adanya penilaian dampak lingkungan (AMDAL) yang ketat dan transparan, proyek seperti PIK 2 dapat menimbulkan kerusakan jangka panjang pada keanekaragaman hayati. Selain itu, terdapat risiko penggusuran komunitas lokal yang rentan, yang sering kali tidak diberi kompensasi yang memadai.

Meskipun manfaat ekonomi dari proyek seperti PIK 2 sering kali dijadikan alasan utama, penting untuk diingat bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Pemerintah dan pengembang perlu memastikan bahwa setiap langkah pembangunan

dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang ketat.

Dimana pembangunan PIK 2 ternyata berpotensi mempengaruhi terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal. Jika tidak dikelola dengan baik, pembangunan ini dapat menyebabkan eksplorasi berlebihan terhadap perekonomian, sosial dan budaya masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang tidak sesuai dapat menimbulkan masalah terhadap pendapatan masyarakat dan kerusakan budaya masyarakat lokal. Besarnya ancaman terhadap sumber daya alam akibat alih fungsi lahan yang akan terjadi selama pembangunan PIK 2 serta potensi kerusakan ekosistem di sekitarnya, niscaya akan berdampak signifikan pula terhadap wilayah di sekitarnya. Pengembangan PIK2, termasuk pemulihan hutan mangrove, dapat membahayakan keberlanjutan ekosistem dan merusak lingkungan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat.

Apabila reklamasi lahan membahayakan ekosistem penting seperti hutan bakau dan fungsi penyangga alamnya, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hak masyarakat untuk hidup di lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Dampak dari peristiwa yang terjadi menunjukkan bahwa komunitas sedang mengalami beberapa fenomena yang tidak sejalan dengan hak hidup yang dimiliki oleh seluruh orang. Dimana semua masyarakat memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang sehat dan aman.

Pembangunan yang merugikan lingkungan, seperti polusi udara, air, dan tanah, atau kerusakan yang mengancam kelangsungan hidup ekosistem, dapat melanggar hak ini. Dimana hal tersebut melanggar hak hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dampak Ekonomi

Perspektif warga negara mencakup hak masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam di wilayah mereka. Pembangunan PIK 2, terutama yang melibatkan penggusuran masyarakat dan perubahan penggunaan lahan dalam skala besar, kerap kali memicu ketegangan terkait pelanggaran hak sipil. Pelanggaran hak sipil yang dirasakan warga Desa Muara akibat pembangunan PIK2 antara lain: 1. Pembangunan tembok perbatasan yang tingginya sekitar 10 kaki, telah memberikan dampak besar pada masyarakat sekitar. Karena jalan yang biasanya digunakan penduduk setempat kini ditutup, para nelayan tradisional terpaksa menempuh jarak yang jauh untuk mencapai laut. Keberadaan tembok pemisah tersebut tentu saja menyulitkan masyarakat dalam mengakses jalan raya.

Sekalipun jalanan dapat dilalui, pembangunan tembok perbatasan ini akan membatasi akses ke jalanan tersebut, dan struktur jalan yang rusak juga akan menghalangi akses kendaraan bagi masyarakat setempat. Kelompok yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut seperti nelayan, kuli angkut, dan pedagang ikan niscaya akan merasakan langsung perubahan yang ditimbulkan oleh pembangunan PIK 2 (Suryansyah, 2024).

Sulit bagi mereka untuk mengakses tempat mereka mencari nafkah. Tentu saja, ini juga berarti bahwa akses pengelolaan daya dibatasi. 2. Mata pencaharian yang rawan hilang, kawasan yang dialihfungsikan atau direklamasi selama pembangunan PIK 2 merupakan salah satu kawasan hutan mangrove yang dilindungi. Hutan bakau juga menyediakan mata pencaharian bagi penduduk setempat. Pengamat sosial Spaldiono mengatakan proyek berskala besar seperti PIK 2 berisiko menciptakan ketimpangan sosial yang lebih besar antara si kaya dan si miskin. Menurutnya, proyek tersebut telah

mempengaruhi keseimbangan sistem masyarakat akibat perubahan budaya dan hilangnya mata pencaharian masyarakat setempat. Ketika restorasi habitat menjadi sulit dan sebagian besar ekosistem laut yang mendukung penghidupan mereka hilang, komunitas harus mencari pekerjaan alternatif. Meskipun PIK 2 menawarkan pekerjaan sebagai pembersih taman, penyiram taman, satpam, atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan usaha di kawasan PIK 2, namun masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap peluang tersebut dan merasakan dampak dari mata pencaharian tradisional mereka sebagai nelayan terancam.

Dampak Sosial

Penyimpangan hak atas tempat tinggal yang layak huni, masyarakat yang terkena dampak penggusuran dan perubahan penggunaan lahan berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk perumahan mereka.

Jika pengembangan PIK 2 dilakukan tanpa kompensasi yang memadai dan prosedur pemukiman kembali yang tepat, hal itu dapat dianggap sebagai pelanggaran hak-hak sipil penghuni. Masyarakat juga mempunyai hak untuk menerima informasi yang jelas tentang dampak pembangunan terhadap kelangsungan hidup mereka. Misalnya saja dengan dibangunnya proyek PIK 2, rumah warga kini juga dibatasi tembok setinggi 10 kaki. Kehadiran tembok tinggi juga menghambat aliran udara warga. Akibatnya, tempat tinggal warga semakin sumpek (Zahira, n.d.).

Hal ini tentu saja melanggar Pasal 40 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Pasal yang sama menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup dan kehidupan yang sesuai dengan martabat manusia" (KOMNAS HAM RI, 2022).

Keberadaan tembok perbatasan tersebut telah memutus batas rumah penduduk, sehingga sirkulasi udara menjadi terbatas dan membuat penduduk tidak sehat. Selain itu, masyarakat yang tinggal di dekat bangunan PIK 2 juga terkena dampak polusi udara. Warga sekitar harus menghirup udara tercemar setiap harinya yang dikeluarkan oleh mobil dan truk yang melewati pembangunan PIK 2, ini juga tidak baik untuk kesehatan orang-orang yang masih tinggal di area.

Setiap masyarakat di wilayah tersebut tentunya mempunyai hak atas tempat tinggal yang layak serta lingkungan hidup yang sehat dan layak. Selain itu, masyarakat yang tinggal di dekat bangunan PIK 2 juga terkena dampak polusi udara. Warga sekitar harus menghirup udara tercemar setiap harinya yang dikeluarkan oleh mobil dan truk yang melewati pembangunan PIK 2. ini juga tidak baik untuk kesehatan orang-orang yang masih tinggal di area. Setiap masyarakat di wilayah tersebut tentunya mempunyai hak atas tempat tinggal yang layak serta lingkungan hidup yang sehat dan layak.

Konsep

Smart City: Integrasi Teknologi, Tata Kelola, dan Inklusi Menuju Pembangunan Berkelanjutan Smart City merupakan paradigma paling inovatif dalam mengelola pembangunan perkotaan di era digital, didasarkan pada integrasi fundamental Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Internet of Things (IoT). Konsep ini bertujuan utama untuk meningkatkan efisiensi operasional kota, menjamin keberlanjutan sumber daya, dan secara komprehensif meningkatkan kualitas hidup seluruh penduduk. Inti dari ekosistem ini terletak pada Fondasi Teknologi yang kuat, di mana IoT menghubungkan berbagai perangkat pintar—misalnya sensor pada lampu jalan yang mengatur intensitas cahaya secara otomatis—untuk memungkinkan pertukaran data real-time. Data masif yang dihasilkan (Big Data) kemudian diolah menggunakan Kecerdasan Buatan (AI), yang menghasilkan wawasan analitis untuk mendukung pengambilan keputusan yang prediktif dan efisien. Seluruh sistem ini ditopang oleh Infrastruktur Digital yang tangguh, termasuk

jaringan internet berkecepatan tinggi, platform cloud, dan jaringan 5G yang krusial untuk konektivitas stabil dan cepat, mendukung aplikasi cerdas yang membutuhkan pertukaran data secara real-time.

Implementasi teknologi ini sangat jelas terlihat pada sektor Smart Transportation, yang dirancang untuk mencapai mobilitas efisien dan ramah lingkungan. Sistem ini mencakup integrasi Kendaraan Listrik (EV) yang mengurangi emisi, didukung oleh pengembangan Smart Grid untuk optimasi pengisian daya. Selanjutnya, Sistem Transportasi Multimoda mengintegrasikan berbagai moda transportasi (bus, kereta api, sepeda) melalui aplikasi TIK untuk pengalaman perjalanan yang mulus dan inklusif. Analitik Data menjadi elemen kunci untuk pengelolaan lalu lintas adaptif dan efisien. Inovasi lainnya seperti Parkir Cerdas menggunakan sensor untuk memantau ketersediaan real-time guna mengurangi kemacetan, sementara Kendaraan Terhubung (V2V/V2I) berkomunikasi dengan infrastruktur kota untuk mengatur lalu lintas secara dinamis, sehingga meningkatkan efisiensi dan keselamatan.

Di sisi Tata Kelola Cerdas (Smart Governance), fokusnya adalah menciptakan administrasi publik yang transparan dan efisien. Hal ini diwujudkan melalui Pemerintahan Digital (E-Government), seperti program SPBE di Indonesia, yang mempermudah warga mengakses layanan dan mengajukan keluhan secara real-time. Tata kelola cerdas juga menjunjung tinggi Partisipasi Warga dalam perencanaan kota, menggunakan platform partisipatif untuk memungkinkan warga mengajukan ide dan memantau proyek. Namun, dalam mengelola ekosistem digital ini, pemerintah harus memastikan adanya Kebijakan Inklusif dan Perlindungan Data yang etis, dengan merujuk pada standar global seperti GDPR, untuk menjaga privasi dan hak digital warga.

Selanjutnya, Inklusi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah pilar krusial untuk memastikan bahwa semua warga merasakan manfaat Smart City. Guna mencegah risiko Kesenjangan Sosial dan Ekonomi, pemerintah harus meningkatkan Digital Literacy dan Aksesibilitas Teknologi, terutama bagi kelompok rentan, melalui program literasi digital (seperti Gerakan Nasional Literasi Digital). Solusi yang diimplementasikan harus inklusif, menyediakan subsidi perangkat digital, konektivitas internet yang terjangkau, dan platform yang ramah pengguna.

Penerapan konsep Smart City yang holistik ini menjadi kerangka utama dalam pengembangan kawasan terpadu seperti Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), yang mengusung visi sebagai "The New Jakarta City." PIK 2 mengadopsi enam pilar penting (Governance, Branding, Economy, Living, Society, dan Environment) untuk mewujudkan kota mandiri yang berkelanjutan. Dalam aspek Smart Governance, diterapkan penggunaan CCTV speed dom dan fix camera yang terintegrasi di common center untuk pemantauan keamanan 24 jam dan respons cepat. Komitmen utamanya terlihat pada Smart Environment yang mengutamakan kelestarian ekosistem pesisir. Hal ini diwujudkan melalui program Konservasi Mangrove, yang tidak hanya berfungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi dan penyerap karbon, tetapi juga dikelola sebagai pusat ekowisata dan edukasi. Selain itu, dibangun pula Greenbelt seluas 60 hektar sebagai paru-paru kota. Greenbelt ini dilengkapi dengan jalur jogging dan bicycle track sepanjang 10 km, yang secara langsung mendukung Smart Living dan mendorong gaya hidup sehat. Secara keseluruhan, PIK 2 merefleksikan upaya nyata untuk mengintegrasikan seluruh komponen Smart City—dari teknologi konektivitas, mobilitas cerdas terpadu, hingga komitmen lingkungan yang kuat—demi menciptakan lingkungan perkotaan yang modern, berkelanjutan, inklusif, dan berpusat pada kualitas hidup warganya.

KESIMPULAN

Proyek pembangunan PIK 2 menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat sekitar. Dari sisi lingkungan, reklamasi menyebabkan kerusakan ekosistem mangrove dan hilangnya fungsi alam pesisir. Secara ekonomi, masyarakat pesisir kehilangan mata pencaharian tradisional akibat terbatasnya akses ke laut. Dari segi sosial, terjadi pelanggaran hak atas tempat tinggal layak serta menurunnya kualitas hidup karena polusi dan pembatasan ruang. Dengan demikian, proyek PIK 2 perlu dievaluasi agar lebih berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan bagi masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M . H ., Wanusmawatie, I. . (2025). Pembangunan Pantai Indah Kapuk 2 sebagai Proyek Strategis Nasional (Studi Penerapan Society Centered Approach dalam Kritik Pembangunan PIK 2), 22443-22453.
- Berita KOMPAS 20 Desember 2024 Dampak Lingkungan Proyek Strategis Nasional PIK 2,Konten ini Tayang di Kompasiana.com Dengan Judul”Dampak Dampak Lingkungan Proyek strategis Nasional PIK 2 (Kreator : Tegar Adi)
- Buku Pengelolaan Lingkungan Perkotaan Berbasis Teknologi Agustus 2024. Karya Penulis Kerlima Hutagaol, S.T., M.T.
- Clement Alexandrico Waruwu (Departemen politik dan ilmu Pemerintahan,Universitas Diponegoro Indonesia Jl.Prof,Soedarto,SH Tembalang,Semarang ,kode Pos 1269 Website: <https://www.fisip.undip.ac.id>
- Nufus, S. . (2025). Dampak Pembangunan PIK 2 terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Lokal. Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research, 2(2), 3183–3188.